

INTISARI

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan hal yang harus dicapai dan dipertahankan oleh pemerintah. Pemerintahan yang menerbitkan laporan keuangan yang tidak berkualitas berpotensi akan berbagai permasalahan, khususnya berkaitan dengan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh skor reformasi birokrasi dan tingkat inovasi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menguji Produk Domestik Regional Bruto per kapita sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini adalah 80 pemerintah daerah dan atau kota pada tahun 2020 dan 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari *database* klinik akuntansi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN), Keputusan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reformasi birokrasi dan tingkat inovasi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu variabel kontrol PDRB per kapita memoderasi yang bersifat menguatkan hubungan signifikan antara reformasi birokrasi serta tingkat inovasi daerah dengan kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, interaksi antara variabel independen menunjukkan ketiadaan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: kualitas laporan keuangan, reformasi birokrasi, tingkat inovasi daerah, pemerintahan sektor publik

ABSTRACT

The quality of regional government financial statements is something that must be achieved and maintained by the government. Government that issued low-quality financial statements have the potential to have various problems, especially those related to the trust of the users of financial statements. The quality of local government financial statements can be measured using the opinion given by the Indonesian's state agency that have responsibility of state finances, "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)".

This study was conducted to determine the effect of bureaucratic reform scores and the level of regional innovation on the quality of regional government financial report. This study also examines the Gross Regional Domestic Product per capita as a control variable. The sample of this study was 80 regional governments in 2020 and 2021. The data used are secondary data derived from klinik akuntansi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), and Badan Pusat Statistik. The research method used is multiple linear regression analysis.

The result showed that the variables of bureaucratic reform and the level of regional innovation had a significant positive effect on the quality of regional financial statements. In addition, the control variable, Gross Regional Domestic Product per capita, is moderating which strengthens the significant relationship between bureaucratic reform and the level of regional innovation with the quality of financial statements. On the other hand, the interaction between the two independent variables shows that there is no significant effect on the quality of financial statements.

Keywords: *quality of financial statements, bureaucratic reform, level of regional innovation, public sector governance*